

GAMBARAN PELAKSANAAN DAN PENCATATAN ADMINISTRASI PELAYANAN KEGIATAN UKBM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TIRON

Reni Nugraheni

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

Abstract.

Health services at the community health center (Puskesmas) level, particularly through the activities of Non-Hospital Health Units (UKBM), play a crucial role in enhancing access to and the quality of healthcare services for the community. However, the implementation and documentation of administrative activities for UKBM in several regions often face challenges, such as inaccurate data, lack of coordination among staff, and suboptimal recording systems. This study aims to describe the implementation and documentation of administrative activities for UKBM services in the Puskesmas Tiron Work Area and identify the factors affecting its effectiveness. This study uses a descriptive approach with survey and interview methods. Data were collected through direct observation, interviews with Puskesmas staff, and analysis of administrative documents related to UKBM activities in the region. Participants in this study included the head of the Puskesmas, medical personnel, and administrative staff involved in UKBM activities. The results of the study indicate that the implementation of UKBM activities at Puskesmas Tiron has been generally good, but there are still some shortcomings in coordination and administrative documentation. The documentation process still uses manual methods that are prone to errors and data loss. Additionally, there are obstacles in monitoring and evaluating activities, which hinder the efficiency of managing UKBM services. Data analysis shows that the main challenge in implementing UKBM activities is the lack of trained human resources in administrative management, as well as limited facilities and infrastructure to support documentation and reporting. Furthermore, the administrative system that has not been well-integrated causes delays in data entry and reporting, which affects the quality of services. This study suggests that Puskesmas Tiron optimize the use of information technology to improve the efficiency of administrative documentation and minimize errors in data entry. Training and skill development in administration for Puskesmas staff are also essential to improve the management quality of UKBM activities. Moreover, stronger collaboration between relevant parties, both at the Puskesmas level and with other health agencies, should be reinforced to support more coordinated and effective implementation of activities.

Keywords: *Implementation of UKBM Activities, Administrative Records, Tiron Health Center, Public Health, Service Effectiveness*

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menyediakan pelayanan Kesehatan yang berkualitas pihak puskesmas telah menyediakan pelayanan kesehatan yang menyeluruh salah satunya dengan inisiatif pemberdayaan masyarakat dalam bidang Kesehatan. Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat adalah wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Ini dikelola oleh masyarakat, dari masyarakat, untuk masyarakat, dan dengan pembinaan sektor kesehatan, lintas sektor, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. (Kemenkes RI, 2019).

Dengan dukungan dari petugas puskesmas, lintas sektor, dan lembaga terkait lainnya, usaha kesehatan berbasis masyarakat ini dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Diharapkan melalui kegiatan UKBM ini, masyarakat dapat mengatasi masalah kesehatan dasar yang mereka hadapi sendiri. Ini termasuk mempelajari cara memelihara dan melindungi diri sendiri, kelompok, dan masyarakat dari bahaya kesehatan. Posyandu Balita (Pos Pelayanan Terpadu) adalah salah satu UKBM yang paling populer dan dikenal masyarakat. Ada juga beberapa jenis UKBM lainnya, seperti Posyandu Lansia, Pos UKK (Unit Kesehatan Kerja), Polindes (Pos Bersalin Desa), dan Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular). (Rahma et al., 2020). Berikut merupakan data jumlah kegiatan UKBM di wilayah kerja Puskesmas Tiron:

Tabel 1. Jumlah Kegiatan UKBM

No	Kegiatan UKBM	Jumlah
1	Posyandu Balita	61 pos
2	Posyandu Lansia	9 pos
3	Posyandu Remaja	0 pos
4	Pos UKK	2 pos
5	Polindes	7 pos
6	Posbindu PTM	12 pos

Sumber : data Puskesmas Tiron, 2023

UPTD Puskesmas Tiron memiliki total 91 pos untuk seluruh kegiatan UKBM nya yang tersebar pada desa Tiron, Sendang, Jabon, Jatirejo, Banyak dan Maron yang termasuk wilayah kerjanya. Kegiatan UKBM ini tidak lepas kaitannya dengan kegiatan dokumentasi dan laporan.

Dalam kegiatan UKBM, pencatatan berarti mendokumentasikan semua proses yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Catatan yang berisi informasi tentang kegiatan UKBM disebut pelaporan, dan hasilnya disampaikan kepada pihak berwenang dalam bentuk strata. Tujuan dari kegiatan pencatatan dan pelaporan ini digunakan untuk menonitoring status Kesehatan di masyarakat. Pencatatan dan pelaporan pada kegiatan UKBM ini disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan pencatatan informasi kegiatan yang merupakan format baku sesuai dengan program kesehatan.

Ada empat tingkat perkembangan UKBM, yaitu: Pratama adalah kegiatan UKBM yang baru dibentuk, Madya adalah kegiatan UKBM yang sudah berjalan tetapi memiliki tingkat cakupan yang rendah, Purnama adalah kegiatan UKBM yang sudah berjalan tetapi memiliki tingkat cakupan yang tinggi, dan Mandiri adalah kegiatan UKBM yang telah berjalan teratur dengan tingkat cakupan yang tinggi dan lebih dari 50% anggota masyarakatnya telah menjadi anggota dana sehat/JP. Tujuan dilakukan penilaian srata ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan UKBM serta melakukan pembinaan terhadap apa yang masih kurang dan perlu untuk ditingkatkan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini dilakukan melalui wawancara dan observasi. Waktu penelitian pada bulan Januari 2023 yang bertempat di UPTD Puskesmas Tiron Kabupaten Kediri. Informan dalam penelitian ini adalah petugas pemegang program UKBM, Kepala Tata Usaha, Bidan dan Kader pada kegiatan UKBM. Pengambilan data primer dengan menggunakan wawancara dan penyebaran formular strata pada setiap kegiatan UKBM.

C. HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan pencatatan dilakukan oleh kader segera setelah kegiatan dilaksanakan. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan format baku sesuai dengan program kesehatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) sesuai dengan Peraturan yakni: (1) Buku register kegiatan Posyandu balita, remaja dan lansia, Posbindu PTM, Pos UKK dan Polindes (2) Buku catatan kegiatan pertemuan (3) Buku catatan kegiatan usaha (4) Buku pengelolaan keuangan (5) Balok SKDN.

Pelaporan adalah catatan yang berisi informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berhubungan dengan kegiatan tersebut. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas ayat 8 mengenai pelaporan, dalam kegiatan UKBM pelaporan yang dilakukan kepada Dinas Kesehatan dengan mengisi google spreadsheet hasil kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan pada Aplikasi Indonesia Sehat (Asik). Selain itu pelaporan pada puskesmas dilakukan dalam bentuk status strata kegiatan UKBM.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan pada kegiatan UKBM pada wilayah kerja Puskesmas Tiron di ketahui bahwa beberapa kader belum melaksanakan system kegiatan pencatatan dan pelaporan secara maksimal hal ini dibuktikan dengan belum terisinya balok SKDN, kegiatan pelaporan pada google spreadsheet dan aplikasi Asik yang harusnya dilakukan oleh kader namun belum dilaksanakan, hal ini menjadi pengaruh terhadap penilaian status strata kegiatan UKBM.

Dalam kegiatan pencatatan dan pelaporan kegiatan UKBM tidak lepas dari kendala yang di hadapi, kendala umum yang dihadapi Puskesmas Tiron adalah : (1) Pos UKK yang hanya berjalan pada 1 desa, (2) Posyandu Remaja yang belum terlaksana, (3) Belum lengkapnya administrasi pada pelaksanaan kegiatan UKBM, (4) Peran kader masih rendah dalam kegiatan UKBM, (5) kurangnya pemahaman tentang manfaat program UKBM, (6) kurangnya partisipasi sasaran dalam kegiatan UKBM, (7) kekurangan sarana dan prasarana, dan (8) kurangnya kerja sama lintas program dan lintas sektor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas, maka seluruh kegiatan pemberdayaan untuk pencatatan kegiatan dengan SK Organisasi, mengisi balok SKDN, buku register, buku bantu, dan Kartu Menuju Sehat yang dilakukan secara manual.

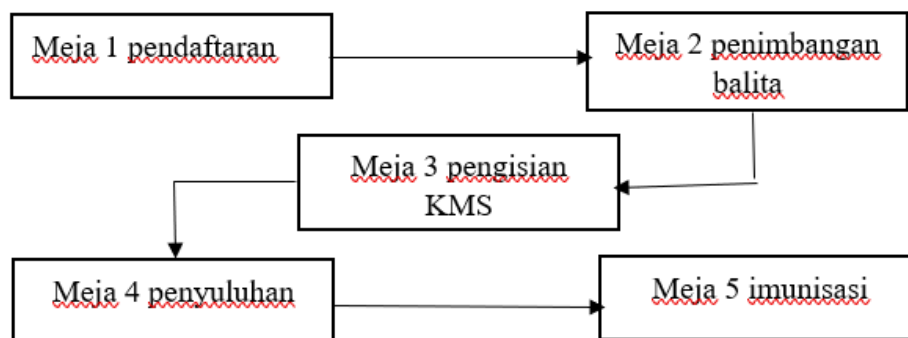
Pengolahan data secara manual dinilai memiliki banyak kelemahan, Adapun kelemahan yang dirasakan oleh kader pada kegiatan UKBM adalah membutuhkan waktu yang lama saat melakukan input data secara manual, keakuratan yang kurang dapat diterima karena kemungkinan kesalahan manusia saat melakukan kegiatan pencatatan.

Kader pada kegiatan UKBM rata-rata tidak memiliki latar pendidikan kesehatan sehingga dibutuhkan pemberian edukasi baik berupa pelatihan maupun pendidikan.

Karena output data ditulis tangan, proses pencarian data membuat kader kegiatan UKBM sulit dibaca. Selain itu, banyaknya regrister membuat pengolahan dan akses kembali data lebih sulit. Ini karena banyaknya data yang sama harus dicatat berulang-ulang dalam beberapa regrister, yang menyebabkan redudansi data.

Metode pencatatan berbasis kertas membutuhkan usaha tambahan untuk menyelesaikannya. Selain itu file-file kegiatan pencatatan kegiatan UKBM di arsip secara manual sehingga memiliki resiko yang lebih besar untuk rusak maupun hilang. Selain itu akibat lain yang dapat ditimbulkan adalah kemungkinan bahwa pemangku kebijakan akan menunda untuk merencanakan tindak lanjut karena keterlambatan dalam proses pelaporan data. Selain itu seluruh kegiatan harus menerapkan sistem 5 meja untuk pelaksanaannya.

1. Posyandu balita



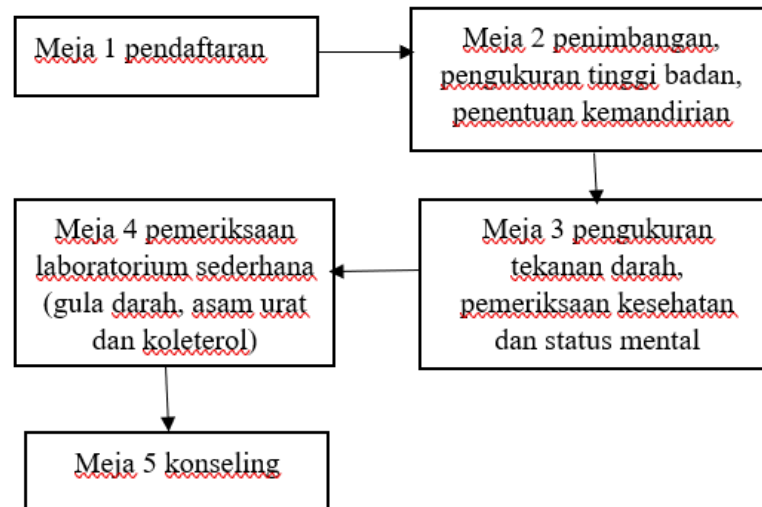
Gambar 1 Alur Kegiatan Pencatatan Posyandu Balita

Mekanisme pelaksanaan :

- Balita dan orang tua datang dan melakukan pendaftaran sebelum dilakukan pemeriksaan
- balita melaksanakan penimbangan dan pengukuran tinggi badan
- Diisi kartu menuju sehat (KMS) berdasarkan berat badan dan tinggi badan.
- Apabila ditemukan masalah gizi pada balita maka dilakukan penyuluhan dan pelayanan gizi bagi balita
- Meja terakhir merupakan pelayanan Kesehatan dengan pemberian imunisasi maupun vitamin bagi balita.

Setelah kegiatan dilaksanakan proses pencatatan dilakukan dengan mengisi balok SKDN dimana isinya mencakup untuk sasaran balita di suatu daerah (S), balita dengan KMS (K), balita yang ditimbang (D), dan balita yang ditimbang dan naik berat badan (N), yang kemudian dihitung sesuai dengan strata Posyandu.

2. Posyandu Lansia



Gambar 2 Alur Kegiatan Pencatatan Posyandu Lansia

Mekanisme :

- Lansia datang dan melakukan pendaftaran sebelum dilakukan pemeriksaan
- Lansia melakukan penimbangan, pengukuran tinggi badan, penentuan kemandirian
- Lansia menjalani pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kesehatan, dan pemeriksaan kesehatan mental.
- Lansia melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana (gula darah, asam urat dan kolesterol)
- Apabila ditemukan masalah Kesehatan pada lansia maka dilakukan konseling dengan petugas Kesehatan apakah perlu rujukan atau tidak

Proses pencatatan pada posyandu usia lanjut dilakukan pada KMS usia lanjut, alat untuk mencatat kesehatan fisik dan psikososial usia lanjut secara pribadi, digunakan untuk memantau kesehatan, menemukan penyakit dini, dan menilai kemajuan kesehatan usia lanjut. Setelah kegiatan, perhitungan status strata posyandu usia lanjut akan dilakukan.

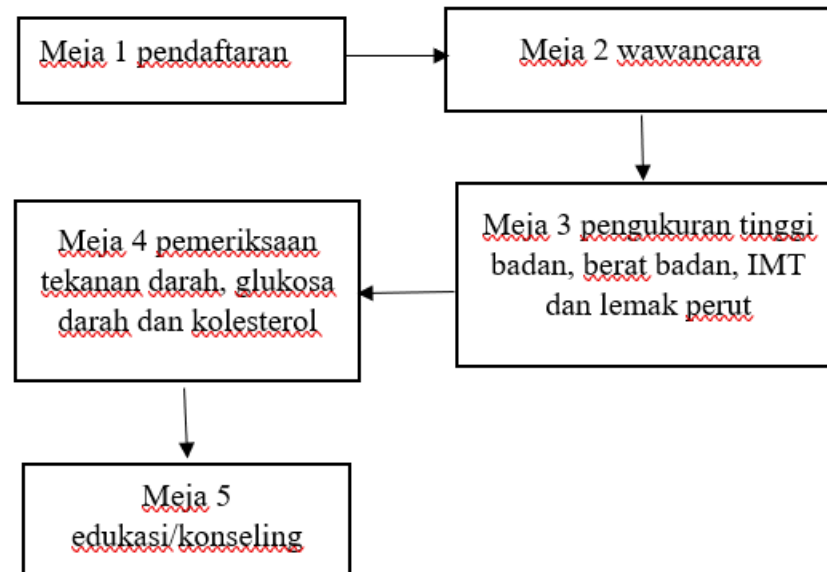
3. Pos UKK

Pos UKK merupakan bentuk kegiatan UKBM yang memberikan pelayanan Kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja, terutama pekerja informal. Pos UKK dibutuhkan untuk memberikan pelayanan Kesehatan yang meliputi peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit dan pengobatan sederhana bagi masyarakat pekerja yang beresiko terpajan oleh pekerjaan dan lingkungan kerjanya sehingga mereka mampu menolong dirinya sendiri (Mulyanto et al., 2013). Pada wilayah kerja Puskesmas Tiron memiliki 2 Pos UKK namun kegiatan ini belum sepenuhnya terlaksana dan baru berjalan di satu desa.

4. Polindes

Pondok bersalin di Desa (Polindes) yang bertujuan untuk memudahkan akses terhadap pelayanan persalinan dan membantu mengatasi masalah mortalitas pada wilayah kerjanya. Pada Puskesmas Tiron memiliki 7 Polindes namun kegiatan ini hanya berjalan di 5 desa. Faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan Polindes ini adalah sasarannya yaitu ibu hamil yang lebih memilih melakukan persalinan pada dokter, klinik maupun rumah sakit sehingga kegiatan ini tidak berjalan.

5. Posbindu PTM



Gambar 3 Alur Kegiatan Pencatatan Posbindu PTM

Mekanisme :

- Sasaran dari Posbindu PTM datang dan melakukan pendaftaran sebelum dilakukan pemeriksaan
- Dilakukan wawancara sebelum pemeriksaan kesehatan
- Sasaran melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh (IMT) dan lemak perut.
- Sasaran melakukan tekanan darah, glukosa darah dan kolesterol
- Apabila ditemukan masalah kesehatan pada sasaran maka dilakukan konseling/edukasi dengan petugas kesehatan apakah perlu rujukan atau tidak

Proses pencatatan pada Posbindu PTM hanya dilakukan pada kartu rawat jalan pasien yang berisi hasil dari pemeriksaan cek Kesehatan yang telah dilakukan. Setelah kegiatan akan dilakukan perhitungan status strata pada Posbindu PTM.

Setiap tindakan diakhiri dengan pembuatan laporan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas, kegiatan pelaporan dilakukan secara digital dengan menggunakan google spreadsheet, laporan pada aplikasi Indonesia sehat /asik, dan laporan status strata pada setiap kegiatan UKBM, apabila ditemukan kasus saat pelaksanaan kegiatan akan dilakukan

rujukan ke Puskesmas. Berikut merupakan status strata sebagai bentuk pelaporan pada kegiatan UKBM di wilayah kerja Puskesmas Tiron.

Tabel 2. status strata kegiatan UKBM

No	Jenis kegiatan	Status Strata				Jumlah
		Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	
1	Posyandu Balita	-	3	48	10	61
2	Posyandu Remaja	-	-	-	-	0
3	Posyandu Lansia	-	7	2	-	9
4	Pos UKK	-	1	-	-	1
5	Polindes	-	5	-	-	5
6	Posbindu PTM	-	10	2	-	12

Penilaian status strata penting dilakukan pada kegiatan pelaporan dimana dari status strata tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan UKBM serta melakukan pembinaan terhadap apa yang masih kurang dan perlu untuk ditingkatkan.

Pada kegiatan pencatatan dan pelaporan kegiatan tidak lepas kaitannya dengan factor penghambat kegiatan. Berdasarkan wawancara dari pemegang program UKBM di Puskesmas Tiron yang menjadi factor penghambat kegiatan pencatatan dan pelaporan adalah : (1) Kendala jaringan, dikarenakan kegiatan pelaporan dilakukan secara online maka kendala jaringan menjadi factor penghambat saat melaksanakan pelaporan pada aplikasi ASIK, (2) Jumlah kader, (3) Motivasi kader untuk melaksanakan pelaporan secara online.

D. PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan dan pencatatan administrasi pelayanan kegiatan Unit Kesehatan Bukan Rumah Sakit (UKBM) di wilayah kerja Puskesmas Tiron, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi pencatatan dan pelaporan kegiatan tersebut. Dalam pembahasan ini, peneliti akan mengevaluasi pelaksanaan sistem administrasi UKBM di Puskesmas Tiron, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pencatatan dan pelaporan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi kegiatan UKBM di masa depan.

1. Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan

Pelaksanaan pencatatan administrasi di Puskesmas Tiron dilakukan oleh kader dengan menggunakan format yang telah ditetapkan, sesuai dengan pedoman yang ada dalam sistem Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas, terdapat beberapa format pencatatan yang harus diisi oleh kader, antara lain buku register kegiatan Posyandu untuk balita, remaja, lansia, Posbindu PTM, Pos UKK, Polindes, serta buku catatan kegiatan pertemuan, kegiatan usaha, pengelolaan keuangan, dan balok SKDN.

Namun, dalam praktiknya, pencatatan administrasi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Salah satu temuan yang signifikan dalam penelitian ini adalah ketidakterisian balok SKDN yang seharusnya menjadi bagian integral dalam proses pencatatan kegiatan UKBM. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam pemahaman kader terkait pentingnya pencatatan administrasi yang akurat dan tepat waktu (Hidayati, 2017; Mahfud et al., 2019).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sutaryo et al. (2017) dan Purnama et al. (2019), faktor utama yang mempengaruhi kualitas pencatatan administrasi di puskesmas adalah kurangnya pelatihan dan pemahaman bagi kader mengenai pentingnya pencatatan yang akurat. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya supervisi dan pengawasan dalam memastikan bahwa kader melaksanakan tugasnya dengan baik. Pencatatan administrasi yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat mengganggu pelaporan dan evaluasi program, yang pada gilirannya berdampak pada efektivitas kegiatan UKBM.

2. Sistem Pelaporan Kegiatan UKBM

Pelaporan kegiatan UKBM di Puskesmas Tiron dilakukan dengan menggunakan dua sistem utama: Google Spreadsheet dan Aplikasi Indonesia Sehat (ASIK). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019, pelaporan dilakukan melalui pengisian hasil kegiatan pada Google Spreadsheet dan aplikasi Asik yang merupakan sistem pelaporan berbasis elektronik. Selain itu, status strata kegiatan UKBM juga dilaporkan ke Dinas Kesehatan sebagai bentuk evaluasi atas keberhasilan atau kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan kegiatan UKBM tidak dilaksanakan secara optimal. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa beberapa kader belum mengisi data pelaporan pada aplikasi yang disediakan, dan laporan hasil kegiatan tidak lengkap. Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa ketidakefektifan pelaporan seringkali disebabkan oleh rendahnya keterampilan teknologi kader dalam menggunakan aplikasi berbasis elektronik, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pelaporan yang tepat waktu dan akurat (Bramantyo, 2019; Novitasari et al., 2020).

3. Kendala dalam Pencatatan dan Pelaporan

Puskesmas Tiron menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan kegiatan UKBM. Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, ditemukan beberapa masalah utama yang menghambat kelancaran pencatatan dan pelaporan, antara lain: (1) Pos UKK yang hanya berjalan pada satu desa, (2) Posyandu Remaja yang belum terlaksana dengan baik, (3) Administrasi yang belum lengkap dalam pelaksanaan kegiatan UKBM, (4) Rendahnya peran kader dalam kegiatan UKBM, (5) Kurangnya pemahaman tentang manfaat program UKBM, (6) Kurangnya partisipasi sasaran dalam kegiatan, (7) Kekurangan sarana dan prasarana, dan (8) Kurangnya kerja sama lintas program dan lintas sektor.

Beberapa penelitian sebelumnya mengidentifikasi kendala serupa, seperti kurangnya fasilitas dan sarana prasarana yang memadai, yang berdampak pada kualitas pelaksanaan kegiatan UKBM di puskesmas. Wibowo (2018) dan Mardiani (2019) mencatat bahwa fasilitas yang terbatas dapat menghambat jalannya program kesehatan masyarakat, terutama dalam pelaksanaan UKBM. Selain itu, faktor

koordinasi antar sektor yang kurang optimal juga menjadi penghambat dalam mencapai tujuan program kesehatan berbasis masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Sari et al. (2018).

Kurangnya pemahaman kader dan sasaran tentang manfaat program UKBM juga menjadi kendala yang signifikan. Kader yang tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai tujuan dan manfaat dari program UKBM cenderung kurang aktif dalam menjalankan tugasnya, baik dalam pencatatan administrasi maupun dalam pelaporan kegiatan (Widodo, 2020). Di sisi lain, kurangnya partisipasi sasaran dalam kegiatan UKBM berhubungan erat dengan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya program ini bagi kesehatan mereka (Hidayati, 2017).

4. Analisis Faktor Penghambat

Faktor utama yang menghambat efektivitas pencatatan dan pelaporan administrasi kegiatan UKBM adalah rendahnya keterlibatan kader dalam pelaksanaan kegiatan. Menurut hasil penelitian oleh Nugroho (2021) dan Sari et al. (2018), keterlibatan kader yang rendah dapat mempengaruhi keberhasilan program UKBM secara keseluruhan, terutama dalam hal pencatatan administrasi dan pelaporan. Kader yang tidak terlatih dengan baik atau tidak memahami pentingnya tugas administrasi akan kesulitan menjalankan sistem pencatatan yang efektif.

Selain itu, kurangnya koordinasi lintas sektor juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan UKBM. Penelitian oleh Mahmudi et al. (2019) menunjukkan bahwa program kesehatan masyarakat seperti UKBM membutuhkan dukungan dari berbagai sektor untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik. Tanpa kerja sama yang efektif antara puskesmas, sektor pendidikan, sosial, dan sektor lainnya, kegiatan UKBM cenderung terhambat dan tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan.

E. PENUTUP

Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan administrasi kegiatan UKBM di Puskesmas Tiron masih menghadapi berbagai kendala, termasuk rendahnya keterlibatan kader, kurangnya fasilitas dan sarana, serta masalah koordinasi lintas sektor. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan pelatihan kader, penguatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kerja sama antara sektor terkait untuk meningkatkan efektivitas program UKBM.

Untuk meningkatkan efektivitas pencatatan dan pelaporan kegiatan UKBM di Puskesmas Tiron, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain: (1) peningkatan pelatihan kader mengenai pencatatan administrasi dan pelaporan menggunakan sistem berbasis elektronik, (2) penyediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan UKBM, (3) penguatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung keberhasilan program UKBM, dan (4) pemberdayaan masyarakat dan kader melalui penyuluhan tentang manfaat program UKBM, untuk meningkatkan partisipasi aktif sasaran dalam kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisanti, N., & Sunjaya, D. (2016). Gambaran Pemanfaatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (Ukbn) Di Kecamatan Jatinangor. *Jurnal Sistem Kesehatan*, 1(1), 7–11. <https://doi.org/10.24198/jsk.v1i1.10336>
- Aziz, A. M. (2019). Pembentukan Pos UKK Industri Pembuatan Brem di Desa Kalibaru Wilayah Kerja Puskesmas Mejayan Madiun. *Warta Pengabdian*, 13(3), 64–73. <https://doi.org/10.19184/wrtp.v13i3.8574>
- Bramantyo, M., et al. (2019). *Sistem Informasi Kesehatan: Implementasi dan Tantangan di Puskesmas*. Jakarta: Kencana.
- Hidayati, N. (2017). *Kendala dalam Implementasi Sistem Pencatatan Administrasi Kesehatan di Puskesmas*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(4), 12-21.
- Kesehatan, P. O. S., Di, P., Pesantren, P., Kota, R., & Tahun, D. (2020). Pendahuluan. 3(5).
- Mahfud, A., et al. (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Program UKBM di Puskesmas: Studi Kasus di Kabupaten X*. *Jurnal Administrasi Kesehatan*, 10(2), 98-105.
- Mahmudi, S., et al. (2019). *Penguatan Kerja Sama Lintas Sektor dalam Peningkatan Kesehatan Masyarakat*. *Jurnal Kesehatan dan Kebijakan*, 14(3), 67-74.
- Mardiani, R. (2019). *Kolaborasi Lintas Sektor dalam Program Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muliyanto, Lubis, H. S., & Syahri, I. M. (2013). Pelaksanaan Program Upaya kesehatan Kerja pada Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Bugis Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau. *Lingkungan Kerja Sehat*, 1, 1–7.
- Nain, U. (2015). Posyandu Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat. 1–89.
- Novitasari, L., et al. (2020). *Evaluasi Sistem Pelaporan Kesehatan di Puskesmas: Penggunaan Aplikasi Asik*. Jakarta: Sains Medika.
- Nugroho, A. (2021). *Keterlibatan Kader dalam Program UKBM di Puskesmas: Studi Kasus di Yogyakarta*. *Jurnal Manajemen Kesehatan*, 8(3), 123-130.
- Purnama, E., et al. (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Kesehatan di Puskesmas*. *Jurnal Kesehatan*, 10(1), 45-52.
- RI, M. K. (2019). No TitleEΛENH. *Αγαν*, 8(5), 55.
- Sanah Nor. (2017). Pelaksanaan fungsi puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 305–314.
- Sarasanty, D., Sutrisno, E., & Andriyanto, J. (2022). Peningkatan kemampuan perencanaan teknis pembangunan gedung polindes pemerintah desa meluntur lamongan. 6(3), 1797–1807.
- Sari, F., et al. (2018). *Tantangan dalam Pengelolaan Sistem Administrasi Kesehatan di Puskesmas*. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 15(3), 32-41.
- Setiyawan, Y. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas 1–14.

- Sutaryo, E., et al. (2017). *Pengaruh Pelatihan Kader Terhadap Efektivitas Administrasi Kesehatan di Puskesmas*. Jurnal Administrasi Kesehatan, 11(2), 54-62.
- Utami, T. N. (n.d.). *Pencatatan & Pelaporan* (2019). No 6(1), 5–10.
- Wibowo, D. (2018). *Faktor Penghambat Keberhasilan Program Kesehatan Masyarakat di Puskesmas*. Yogyakarta: Pustaka Abadi.
- Widodo, Y. (2020). *Peran Kader dalam Implementasi Program UKBM di Puskesmas: Studi Kasus di Kabupaten Y*. Jurnal Manajemen Kesehatan, 9(4), 101-108.